

BAB I

PENDAHULUAN

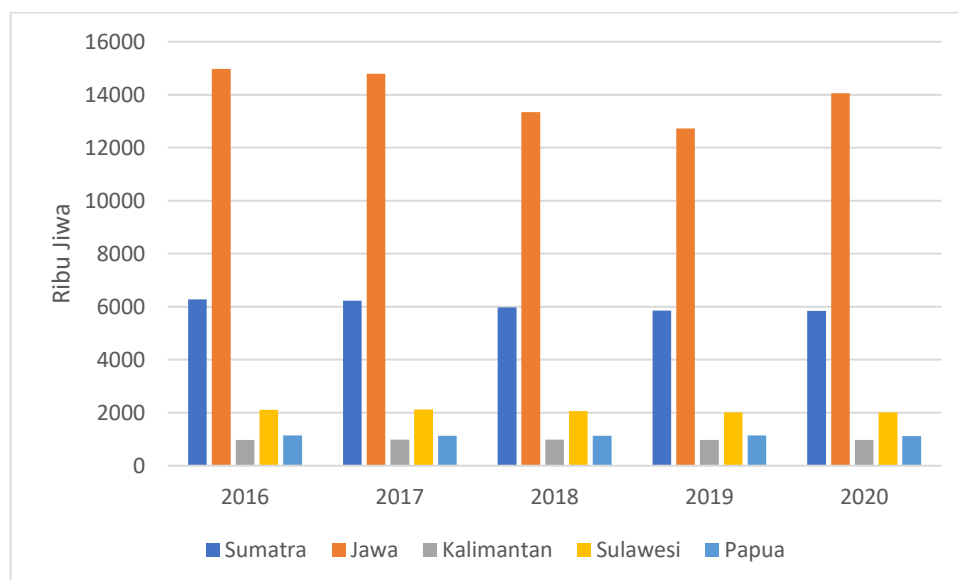
1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang selalu menjadi topik hangat dalam perbincangan dan perdebatan di forum nasional maupun internasional. Yacoub (2012) berpendapat bahwa kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara.

Bagi negara berkembang, tujuan akhir suatu negara yaitu pengentasan dan terciptanya kesejahteraan bagi rakyat. Fakta menunjukkan bahwa segala upaya yang telah dilakukan belum mampu meredam terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin khususnya bagi negara-negara berkembang. Kemiskinan merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh negara yang ada di seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi permasalahan yang hingga sekarang belum bisa diselesaikan dan menunjukkan tanda-tanda berakhir.

Di Indonesia permasalahan kemiskinan menjadi masalah yang sangat serius, hal ini terjadi tidak hanya karena tendensinya yang terus mengalami peningkatan namun dilihat juga dari konsekuensi yang luas dan tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata tetapi juga berkaitan dengan masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri. Sehingga pengentasan masalah kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Masalah kemiskinan masih melekat erat di umur negara Indonesia yang telah mencapai 75 tahun. Hal ini dapat dilihat dari

tingkat kemiskinan sebesar 10,19 persen dari total populasi rakyat Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 271 juta jiwa. Dengan tingkat kemiskinan 10,19 persen menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang mengalami masalah kemiskinan mencapai 27,55 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2019) Khususnya Provinsi-provinsi di Pulau Jawa mengalami masalah kemiskinan yang cukup serius, hal ini karena peningkatan penduduk belum bisa diatasi. Dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016-2020 jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa paling tinggi dibandingkan dengan Pulau lainnya yang ada di Indonesia.



Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin 5 Pulau Besar di Indonesia tahun 2016-2020

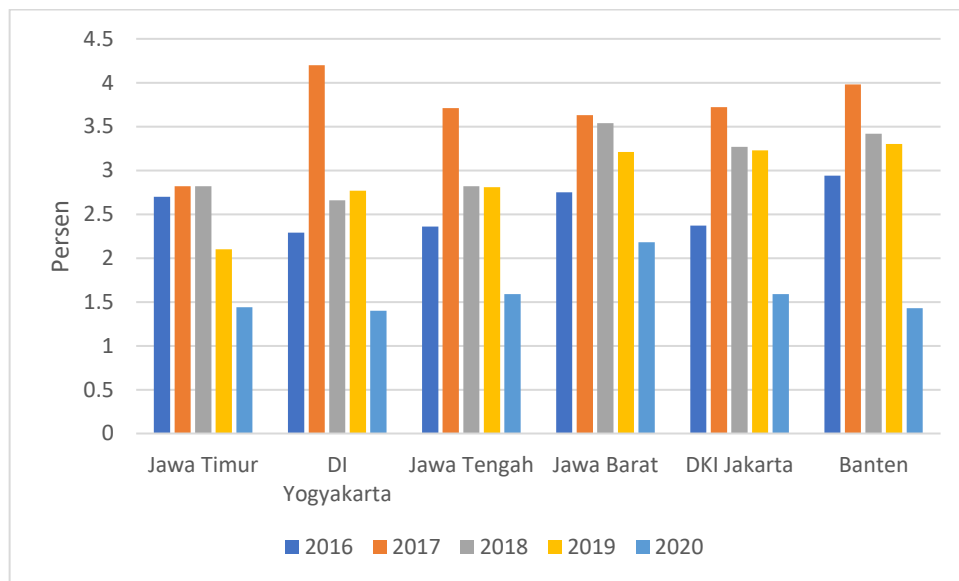
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Menurut data BPS, pada gambar di atas terlihat jelas bahwa jumlah penduduk miskin Pulau Jawa dari tahun 2016 sampai tahun 2020 menempati peringkat pertama menurut 5 Pulau Besar di Indonesia. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa sebesar 14.971 ribu jiwa, pada tahun 2017 penduduk miskin di Pulau Jawa sebesar 14.789 ribu jiwa, pada tahun 2018 penduduk miskin di Pulau Jawa sebesar 13.340 ribu jiwa, pada tahun 2019 penduduk miskin di Pulau Jawa sebesar 12.723 ribu jiwa, pada tahun 2020 penduduk miskin di Pulau Jawa sebesar 14.000 ribu jiwa.

penduduk miskin di Pulau Jawa sebesar 14.052 ribu jiwa. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur (Royat, 2015).

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia perlu diketahui sebenarnya faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan atau mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di Indonesia sehingga kedepannya dapat diformulasikan sebuah kebijakan publik yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini. Dari banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, penelitian ini mengambil beberapa faktor yang ada seperti inflasi, upah minimum provinsi dan jumlah penduduk. Hal ini diharapkan untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruhnya terhadap kemiskinan.

Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan inflasi dianggap terjadi apabila proses kenaikan harga berlangsung terus-menerus dan saling berpengaruh satu sama lain.



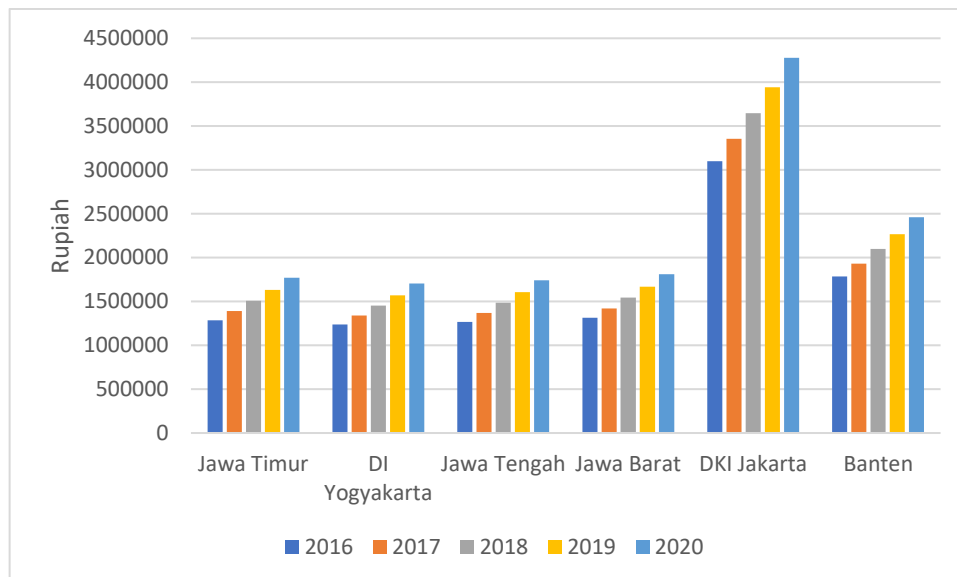
Gambar 1. 2 Tingkat Inflasi Menurut Provinsi di Pulau Jawa tahun 2016-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Menurut gambar diatas bisa dilihat bahwa pada tahun 2016 tingkat inflasi paling tinggi berada di provinsi Banten sebesar 2,94 persen. Pada tahun 2017 tingkat paling tinggi berada di provinsi DI Yogyakarta sebesar 4,2 persen. Pada tahun 2018 tingkat paling tinggi berada di provinsi Jawa Barat sebesar 3,54 persen. Pada tahun 2019 tingkat paling tinggi berada di provinsi Banten sebesar 3,3 persen. Dan di tahun 2020 tingkat paling tinggi berada di provinsi Jawa Barat sebesar 2,18 persen. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tanjung (2019) memperoleh hasil bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Sebaliknya Pratama (2014) memperoleh hasil bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Upah Minimum Provinsi adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pekerja atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pekerjanya. Upah minimum ditetapkan oleh gubernur berdasarkan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja atau serikat buruh pada sektor yang

bersangkutan. Penetapan upah minimum sektor ini dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota.

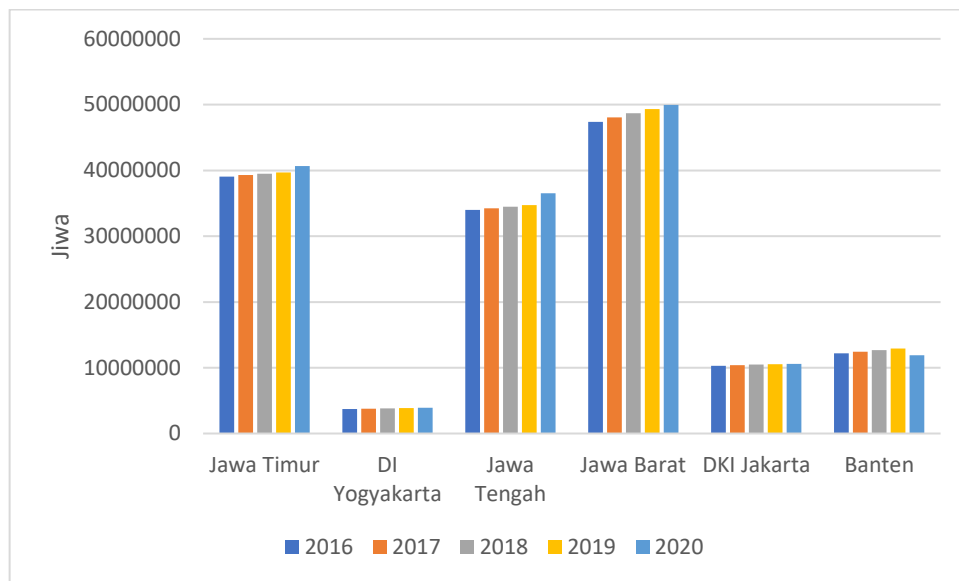


Gambar 1. 3 Upah Minimum Provinsi Menurut Provinsi di Pulau Jawa tahun 2016-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Dapat dilihat gambar di atas bahwa upah minimum provinsi tahun 2016 sampai 2020 provinsi DKI Jakarta paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Pada tahun 2016 upah minimum provinsi di DKI Jakarta sebesar Rp. 3.100.000 dan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya sampai pada tahun 2020 upah minimum provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 4.276350. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2016) memperoleh hasil bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia menjelaskan “Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap”.



Gambar 1. 4 Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Pulau Jawa tahun 2016-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk tahun 2016 sampai 2020 provinsi Jawa Barat menduduki peringkat atas terbanyak jumlah penduduknya. Pada tahun 2016 jumlah penduduk provinsi Jawa Barat sebesar 47 juta jiwa dan di tahun-tahun berikutnya jumlah penduduk di provinsi Jawa Barat terus meningkat sampai tahun 2020 jumlah penduduk provinsi Jawa Barat mencapai sebesar 49 juta jiwa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Azizah dan Kusuma (2018) memperoleh hasil bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.

Dari penelitian terdahulu yang merupakan bagian dari topik pembahasan, maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan kombinasi variabel, objek penelitian, tahun penelitian. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah inflasi, upah minimum provinsi, dan jumlah penduduk dengan menggunakan data tahunan mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2021. Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan adalah

terkait **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi-provinsi Pulau Jawa?
2. Apakah upah minimum provinsi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi-provinsi Pulau Jawa?
3. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi-provinsi Pulau Jawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini diperoleh tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi-provinsi Pulau Jawa
2. Mengetahui pengaruh upah minimum provinsi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi-provinsi Pulau Jawa
3. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi-provinsi Pulau Jawa

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam hal ini. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Sebagai sarana pertimbangan dalam menentukan kebijakan dalam mengurangi kemiskinan.

2. Sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan perubahan pada jumlah uang beredar, tingkat suku bunga dan inflasi mempengaruhi kemiskinan.
3. Sebagai salah satu sumber informasi tentang perkembangan inflasi, upah minimum provinsi, dan jumlah penduduk mempengaruhi kemiskinan.